



PERPUSTAKAAN KSK
130200 251
Perpus - KPK/1203
A KSK 8

Perpustakaan
KPK
Kamisi Pemberantasan Korupsi
Direktarat Utama
anti korupsi



yang masih rendah tidak memungkinkan bergaul rapat dengan para petinggi di kantornya. Dia membutuhkan tangan lain untuk menggerakkan pejabat di atasnya. Ia pun mengenalkan Alif dengan Maruli Pandapotan Manurung, atasannya.

Menurut Gayus, Marulilah yang meminta pembentukan tim khusus untuk memeriksa tindakan Kantor Pajak Gambir menyandera surat ketetapan pajak PT Kaltim. Maruli beberapa kali bertemu Gayus dan Alif di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, sebelum tim Dirjen Pajak bergerak. Surat ketetapan pajak PT Kaltim Prima Coal akhirnya terbit setelah tim Maruli turun tangan langsung.

Untuk keperluan ini, menurut Gayus, PT Kaltim mengeluarkan setidaknya US\$ 2,5 juta melalui Alif Kuncoro. Ia mengaku menerima US\$ 500 ribu, Alif mendapat jumlah yang sama, dan Maruli memperoleh US\$ 1,5 juta. Semua diserahkan di tempat parkir Hotel Peninsula. "Uang yang saya terima saya simpan dulu di rumah, kemudian setelah beberapa bulan saya setor ke BCA dan Panin," kata Gayus, seperti dituturkan sumber *Tempo*.

Sampai akhir pekan lalu, Maruli tak bisa ditemui. Sejumlah sumber *Tempo* memastikan pegawai pajak ini sudah diperiksa polisi, meski belum ditetapkan menjadi tersangka. Fendy Dharma Saputra, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gambir ketika itu, menolak

Pertambangan Kaltim Prima Coal di Sangata, Kutai Timur.



berkomentar. "Ini terkait dengan rahasia jabatan," katanya. "Dan lagi, kasusnya sedang dalam pemeriksaan yang berwajib." Walhasil, patgulipat seputar surat ketetapan pajak PT Kaltim ini memang baru klaim sepihak Gayus.

...
KOMPLOTRAN Gayus kemudian memuluskan persoalan pajak yang melibatkan PT Bumi Resources. Masih pada 2008, pria berkepala pelontos ini diminta mengurus proses banding Bumi atas penetapan pajak dari pemerintah. Jika kalah, biduk utama armada kelompok Bakrie itu harus membayar ekstra sampai Rp 100 miliar. Order ini lagi-lagi datang dari Alif Kuncoro dan adiknya, Imam Cahyo Maliki.

"Alif meminta saya membuat surat banding, surat bantahan, dan diminta berkoordinasi dengan panitera pengadilan pajak, untuk memenangkan Bumi Resources," kata Gayus dalam pengakuannya kepada polisi. Kon-

"Semua tuduhan itu tak berdasar, kami menolak semua pernyataan bernada miring seperti itu."

DILEEP SRIVASTAVA

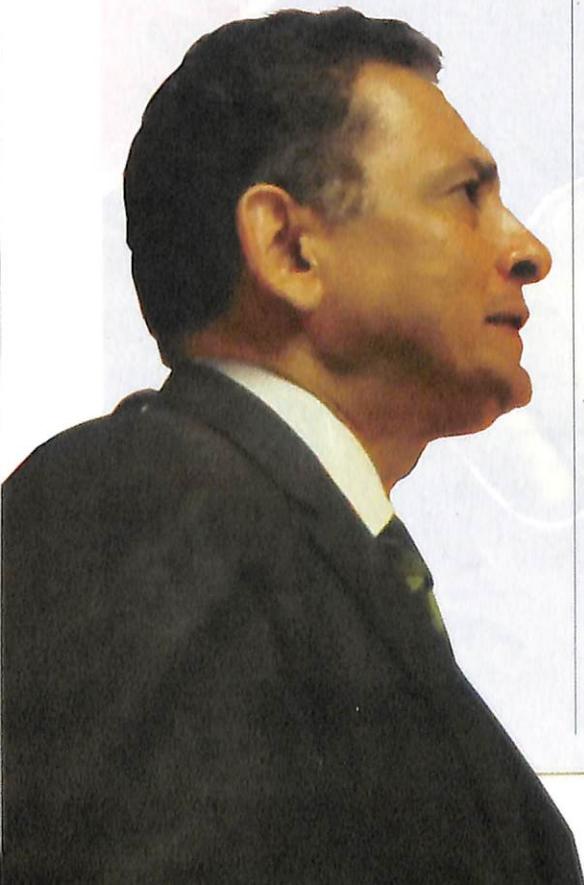
JURU BICARA PT BUMI RESOURCES

sep surat banding dan surat bantahan itu dia ketik di kantornya sendiri, lantai 18 gedung Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan.

Untuk memenangkan sang klien di pengadilan, Gayus juga tak bisa bermain sendiri. Maruli jelas tidak bisa dipakai karena order kedua ini membutuhkan akses dan keahlian berbeda. Dengan cerdik, Gayus menghubungi Idris Herawan, panitera pajak Majelis 10 Pengadilan Pajak. "Saya kenal dia pada saat ikut sidang di sana," kata Gayus. Kehadiran di pengadilan pajak memang bagian dari tugas Gayus sebagai pegawai penelaah banding.

Pada suatu malam, Alif datang membawa US\$ 500 ribu ke apartemen Gayus. Ia juga menitipkan uang dalam jumlah yang sama buat panitera, Idris. Gayus menemui sang panitera di sela-sela istirahat sidang. "Saya menyampaikan ada pekerjaan banding PT Bumi dan minta tolong agar dia mengatur sampai beres. Idris menyanggupi," tuturnya kepada polisi. Duit dolar pun disodorkan ke Idris di tempat parkir bawah tanah gedung pengadilan pajak di daerah Senen, Jakarta Pusat. Tak sampai tiga bulan, pengadilan pajak menerima banding PT Bumi Resources.

Idris, yang dihubungi pekan lalu, membantah semua tuduhan Gayus. "Tidak ada dan tidak tahu," katanya melalui pesan pendek di telepon seluler.





TEMPO/ADITIA NOVIANSAH

Edward Aritonang memberikan keterangan pers.

plotan Gayus memang direncanakan matang agar sulit dilacak. Imbalan untuk mereka selalu dibayar tunai di muka. Selain itu, transaksi selalu dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian dan tak pernah melibatkan lebih dari dua orang.

Untuk proyek perdananya, membantu penerbitan surat ketetapan pajak PT Kaltim Prima Coal, misalnya, Gayus mendapat US\$ 500 ribu, yang dibayar di depan. Menurut Gayus, atasannya, Maruli, kebagian lebih besar: US\$ 1,5

juta. Paket duit tunai itu diserahkan Alif kepada Maruli dan Gayus di *basement* Hotel Peninsula, Sliipi, setelah rapat mereka rampung.

Begitu juga untuk proyek kedua: pemenangan Bumi Resources di pengadilan pajak. Gayus menerima US\$ 500 ribu tunai yang dibawakan Alif langsung ke apartemen Gayus di Cempaka Mas, bersama berkas-berkas lain yang dibutuhkannya. Jumlah yang sama diserahkan ke Alif.

Juru bicara PT Bumi Resources,

Dileep Srivastava, membantah semua keterangan Gayus tentang rekayasa pajak perusahaan Bakrie. "Semua tuduhan itu tak berdasar," kata Dileep. "Kami menolak semua pernyataan bernada miring seperti itu."

Dileep menegaskan, semua laporan keuangan, termasuk pajak perusahaannya, selalu diurus dengan transparan dan bisa langsung dinilai oleh publik. "Kemenangan kami di Mahkamah Agung membuktikan status pajak kami tak bermasalah," ujarnya. Dia curiga ada motif tertentu di balik beredarnya cerita penyuaipan ini. "Jelas ada sesuatu, karena cerita-cerita ini beredar tak lama setelah kami menang atas Dirjen Pajak."

Polisi masih terus menelusuri pengakuan Gayus. Sumber *Tempo* di kepolisian menegaskan, semua orang yang disebut Gayus sudah diperiksa sebagai saksi. Namun belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka.

Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, mengakui ada aliran dana dari Gayus ke petugas pengadilan pajak. Namun dia mengaku belum melihat nama tiga perusahaan Bakrie di daftar perusahaan yang disangka bermain mata dengan Gayus.

Wahyu Dhyatmika, Oktamandjaja Wiguna,
Dwidjo Utomo Maksam, Sutarto

Rahmat Ruslan:

Alif Hanya Pemilik Bengkel

GAYUS tak berhenti berkisah. Dalam pemeriksaan pada April lalu, pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengaku menerima duit dari "mengutak-atik" tiga perusahaan Grup Bakrie—PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin. Dia menyebut kakak-adik Alif Kuncoro dan Imam Cahyo Maliki sebagai orang yang menyetor uang dari perusahaan kakap tersebut kepadanya. Meringkuk di tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Alif menolak ditemui wartawan. Kepada Dwidjo U. Maksam dari *Tempo*, Jumat pekan lalu, Rahmat Ruslan, pengacara Alif, menjelaskan posisi kliennya dalam sengkaret ini.

Alif tak bersedia dimintai konfirmasi, mengapa?

Dia masih trauma. Dia tak ingin masalah ini jadi polemik.

Benarkah Alif mengirimkan uang dari PT Bumi Resources dan PT Kaltim Prima Coal kepada Gayus?

Gayus berhak "nyanyi" apa saja, tapi itu semua tidak benar.

Apa peran klien Anda sebenarnya?

Nanti kita buktikan di pengadilan. Alif sekarang tersangka dan ditahan. Sedangkan Imam Maliki tidak ditahan karena hanya jadi saksi.

Di mana Imam sekarang? Apakah bisa ditemui?

Dia sedang menenangkan diri. Mohon maaf.

Kepada penyidik, Gayus detail menjelaskan sepak terjang Alif...

Biarkan saja Gayus *ngomong* apa saja. Mereka hanya berteman biasa. Gayus sering datang ke bengkel Alif.

Apa kaitan Alif dengan PT Kaltim Prima Coal? Betulkah dia bekerja untuk perusahaan itu?

Itu yang membuat kami dan keluarga Alif ketawa. Jika memang dia bekerja di sana, mengapa tak tercatat di bagian sumber daya manusia? Apa mudah masuk ke perusahaan seperti itu?

Klien Anda hanya perantara?

Bukan. Alif itu hanya pemilik bengkel. Tiap hari kerjanya bolak-balik dari rumah ke bengkel. Tak mungkin menjadi perantara. Saya kan sepupu Alif. Saya tahu semuanya tentang Alif.

Gayus dan Alif sudah pernah dipertemukan?

Mereka pernah bertemu, kok, sewaktu sidang kode etik kasus Arafat (penyidik Polri yang disebut-sebut juga menerima suap Gayus—*Red.*). Gayus kelihatan malu. Alif diam saja.

Anda membantah klien Anda terlibat?

Gayus kan hanya omong. Tak ada bukti. Jadi, lihat saja nanti di pengadilan.



TEMPO/DIMAS ARYO

Dia juga menolak keterangan Gayus yang menyatakan Idris menerima US\$ 500 ribu. Ia mengirim pesan: "Saya tidak pernah menerima apa pun."

Gayus kemudian juga masih sempat membantu dua perusahaan Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, buat menyiapkan surat pemberitahuan pajak pembetulan. Proyek ketiga ini datang menjelang penerapan *sunset policy*, yakni kebijakan Direktorat Pajak untuk menghapus semua sanksi administrasi pajak, pada 2008.

Gayus lalu *ngebut* memperbaiki surat pemberitahuan pajak terutang pajak penghasilan di kedua perusahaan itu. Ketika itu, dia mendapat akses penuh atas data laporan keuangan dan pembukuan Kaltim Prima dan Arutmin. "Saya tahu tindakan saya tidak bisa dibenarkan," kata Gayus ketika diperiksa penyidik.

Kuasa hukum Gayus, Pia Akbar Nasion, menyatakan otentik semua dokumen pemeriksaan Gayus yang diperoleh *Tempo*. Namun dia menolak berkomentar atas isinya.



GAYUS dan Alif kawan lama. Mereka saling mengenal sejak lima tahun lalu dan biasa bertemu di bengkel mobil milik Alif di Jalan KH Abdullah Syaifei 50, kawasan Casablanca, Jakarta Se-

latan. Salah satu mobil Gayus, sebuah Mercedes C180 hitam, dibeli dari Alif Rp 200 juta. "Saya diperkenalkan seorang kawan pada 2005," kata Alif dalam pemeriksaan polisi.

Alif tak melulu pengusaha otomotif. Ketika *Tempo* menemuinya pada pertengahan Maret lalu, dia mengaku terus terang bahwa bisnisnya ada di segala medan. "Orang bilang saya pengusaha 'palugada', apa *lu* mau *gua* ada," katanya terkekeh. Sayangnya, ketika hendak dibesuk di tahanan Mabes Polri pekan lalu, Alif menghindar. "Klien saya trauma," kata pengacaranya, Rachmat Ruslan.

Dua tahun setelah berkawan dengan Alif, Gayus berkenalan dengan adik Alif, Imam Cahyo Maliki. Imam adalah seorang auditor keuangan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Rawamangun, Jakarta Timur. Terakhir, dia bekerja di Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa. Namun, sejak 1999, dia memutuskan berwirausaha sendiri. Dia menjadi auditor keuangan lepas untuk sejumlah perusahaan.

Dua bersaudara inilah yang mempertemukan seorang eksekutif perusahaan Bakrie dengan Gayus. Kebetulan, salah satu wakil presiden bidang keuangan (*vice president finance*) di PT Bumi Resources, Denny Adrianz, adalah mantan kolega Imam di PT Sunkyong-Keris, sebuah perusahaan tekstil patungan In-

donesia-Korea. Pada awal 2008, ketika Denny kelimpungan mencari pegawai Direktorat Pajak yang bisa membantu mengurus masalah pajak perusahaannya, Imam datang menawarkan bantuan.

Pucuk dicita ulam tiba. Kemunculan Gayus Halomoan Tambunan bagai malaikat penyelamat. "Waktu itu Denny ingin tahu bagaimana mekanisme permohonan keberatan pajak untuk perusahaan dia, Bumi Resources," kata Imam dalam pemeriksaan polisi.

Menurut Gayus, dia selalu menemui Denny Adrianz bersama kakak-adik Alif-Imam. Mereka pernah makan siang bersama di restoran hotel berbintang di Ibu Kota seperti Four-Seasons dan Ritz-Carlton, Kuningan. Dalam semua pertemuan itu, Denny tak pernah secara terbuka memberikan fulus. Pembayaran semua order Bumi Resources, menurut Gayus, selalu datang dari tangan Alif.

Adapun Denny Adrianz sampai akhir pekan lalu belum bisa ditemui. *Tempo* menunggu kantornya di lantai 7 Wisma Bakrie II, Kuningan, Jakarta Selatan, tanpa hasil. Surat permohonan wawancara yang dikirim pun tak berbalas. Wenny, sekretaris pribadi Denny, menyatakan bosnya rapat di luar kantor. "Belum tahu," katanya ketika ditanya kapan Denny kembali.

Rekayasa pajak yang dilakukan kom-

Setoran Gelap, Aliran Gelap

Di usia muda, Gayus Halomoan Tambunan, 31 tahun, telah menjadi pemain kakap. Ia menangani 44 banding perusahaan atau wajib pajak. Namanya juga tercantum dalam surat penugasan untuk menangani 104 perusahaan lainnya. Disebut-sebut, anggota staf Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding ini mengantongi US\$ 3 juta dari tiga perusahaan Grup Bakrie—imbalan untuk "membersihkan" masalah pajak perusahaan itu. Perusahaan itu total menyiramkan US\$ 7 juta.



TEMPO/ADITIA NOVIANSAH



PT Bumi Resources: US\$ 2 juta

Keperluan: pengajuan permohonan banding perusahaan ini pada pengadilan pajak.

Penerima:

1. Idris H. (panitera Pengadilan Pajak Majelis 10): US\$ 500 ribu
2. Alif Kuncoro (perantara penerima order dari PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin) US\$ 500 ribu
3. Imam C. Maliki (adik Alif) US\$ 500 ribu
4. Gayus Tambunan US\$ 500 ribu



PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal: US\$ 2 juta

Keperluan: meneliti laporan keuangan dua perusahaan itu untuk keperluan pembetulan surat pemberitahuan pajak terutang pajak penghasilan 2005-2006, guna pengurusan sunset policy.

Penerima: Gayus Tambunan: US\$ 2 juta

PT Kaltim Prima Coal: US\$ 3 juta

Keperluan: mengeluarkan

surat ketetapan pajak 2001-2005 yang ditahan Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Office Gambir karena penetapan kurs mata uang.

Penerima:

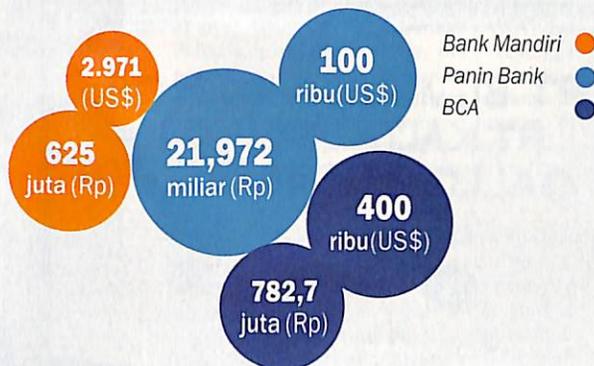
1. MPM (Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak): US\$ 1,5 juta
2. Alif Kuncoro: US\$ 500 ribu
3. Imam C. Maliki: US\$ 500 ribu
4. Gayus Tambunan: US\$ 500 ribu



TEMPO/IGG. MAHA ADI

Simpanan Gayus

Dari hasil "operasi"-nya, Gayus menerima miliaran rupiah. Disimpan beberapa lama, duit dimasukkan ke rekening sejumlah bank. Total, ia memiliki 24 rekening yang tersebar di empat bank dengan total simpanan Rp 23.325.700.00 dan US\$ 502.971.



Buka Blokir Lalu Menguap

Menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kepolisian mempersiapkan rekening Gayus, tahun lalu. Rekening dengan jumlah mencurigakan itu pun diblokir.

Tapi, dengan menyogok kanan-kiri, termasuk ke para penyidikinya, sebagian besar rekening dibuka kembali. Setelah itu, *suur*, duit mengalir ke mana-mana. Di antaranya:



Pengacara Haposan Hutagalung:

Rp 4,72 miliar, untuk menyuap para penyidik Markas Besar Polri.

- Membayar asuransi Rp 1 miliar. Membeli *bank note* Mandiri Rp 490 juta.
- Tabungan Bisnis Mandiri Rp 1 miliar
- Millana Anggraini (istri Gayus) di Bank Mandiri sebesar Rp 3,22 miliar. Oleh Millana, uang kembali diberikan ke Haposan Hutagalung: Rp 2,52 miliar Blokir II Rp 700 juta



Kantor PT Bumi Resources Tbk., PT Kaltim Prima Coal, dan PT Gallo Oil (Jersey) di Jakarta.

Gayus Tambunan saat tiba di gedung TNCC, Mabas Polri, Jakarta (kanan).

Paket Hemat Pajak Batu Bara

Pengakuan Gayus Tambunan membongkar kiat perusahaan batu bara milik Bakrie berkelit dari pajak.

GAYUS Halomoan Tambunan melunasi janjinya. Di depan pengacara senior Adnan Buyung Nasution yang menemui di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Jumat, 3 April lalu, dia "bersumpah" membuka terang-benderang kasus yang melilitnya.

"Akan saya bongkar semua," katanya seperti dituturkan Pia Akbar Nasution, putri Adnan Buyung, kepada *Tempo*, Jumat pekan lalu. Menurut Pia, komitmen Gayus ditetapkan sebagai prasyarat agar ia bisa didampingi Kantor Hukum Adnan Buyung Nasution & Partners.

Lalu patgulipat menggangsir uang negara lewat pajak itu pun terbongkar. Di depan penyidik Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, pemilik rekening Rp 28 miliar ini mengaku pernah "menggarap" perkara pajak tiga perusahaan batu bara milik Grup Bakrie.

Awal 2008, manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC) sedang dilanda persoalan besar. Surat ketetapan pajak periode 2001-2004 tak kunjung diterbit-

kan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar di Gambir, Jakarta Pusat.

Menurut pengakuan Gayus, pangkal soal adalah tidak adanya kata sepakat antara petugas pajak dan KPC tentang penetapan nilai kurs dalam penentuan nilai pajak.

Sumber *Tempo* di Direktorat Jenderal Pajak mengatakan KPC sangat berkepentingan mendapatkan surat tersebut. Sebab, jika tak kunjung datang, perkara pajak yang saat itu tengah diteliti tim pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak bisa berlanjut menjadi bukti permulaan untuk masuk tahap penyidikan. "Kalau ini terjadi, KPC dijerat pasal pidana," katanya.

Bergulirnya kasus pajak ke ranah pidana menjadi momok menakutkan karena bisa bergulir ke pengadilan yang menjebloskan jajaran direksi perusahaan ke penjara. Pilihan lain, jika ingin diselesaikan di luar pengadilan, wajib pajak harus membayar denda 400 persen dari nilai pajak ditambah pokok. "Itu yang dihindari KPC," kata sumber tadi.

Soal berapa nilai pajak KPC yang diurus Gayus, Pia Nasution tak bersedia mengkonfirmasi. "Itu sudah masuk ma-

teri pemeriksaan," katanya.

Namun seorang penyidik polisi memperkirakan tunggakan pajak KPC selama empat tahun mencapai Rp 3 triliun. "Dalam prakteknya, *fee* untuk makelar itu satu persen dari nilai pajak," ujarnya.

Gayus bergerak cepat. Lewat jaringannya, dua tim yang dibentuk Inspektoriat Jenderal Departemen Keuangan dan Direktorat Peraturan Pajak turun tangan "membantu" KPC. Langkah ini berbuah manis: KPC mendapatkan surat ketetapan pajak yang telah lama diimpikan.

Setelah menggarap KPC, Gayus mendapat *gawean* baru. Tak kalah rumit, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 2006 ini mendapat "amanah" memainkan proses banding PT Bumi Resources Tbk., di pengadilan pajak. Tiga tugas besar yang telah dititahkan: menyiapkan surat banding, membuat surat bantahan, dan berkoordinasi dengan panitera untuk memenangkan Bumi.

Langkah Bumi meminta banding bermula dari keputusan Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan nilai pajak badan dan pajak penghasilan untuk tahun buku 2005. Bumi menilai angka pajak yang mesti dibayar terlalu besar. Menurut aturan, wajib pajak boleh me-

Sensasi Laut Mati di Kolam Apung Atlantis

Ancol Taman Impian kembali meluncurkan sarana hiburan inovatif dan edukatif yang menarik untuk memanjakan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pengunjungnya. Sebuah kolam baru berukuran 500 m2 dengan kedalaman satu meter dibangun di areal Atlantis Water Adventure (AWA) dan didisain menyerupai Laut Mati sehingga pengunjung bisa menikmati sensasi mengapung di air tanpa harus berenang seperti layaknya di kawasan wisata dunia yang terletak di Yordania itu. Wahana yang diberi nama Kolam Apung ini sudah mulai bisa dinikmati khalayak mulai 6 Juni 2010.

Layaknya seperti di Laut Mati, dalam uji coba yang dilakukan Ancol Taman Impian, pengunjung nantinya juga bisa mengapung dan melakukan berbagai aktivitas seperti membaca koran sambil tiduran di atas air. "Ini sensasi yang pantas dicoba dan dinikmati," kata Budi Karya Sumadi, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

Dari sisi pengembangan Ancol Taman Impian, kehadiran wahana baru ini merupakan bagian dari strategi yang selalu mengedepankan upaya meningkatkan value melalui berbagai diferensiasi produk yang ada.

"Kehadiran Kolam Apung ini kami harapkan akan makin meningkatkan jumlah pengunjung Ancol Taman Impian karena mampu memberikan sensasi rekreasi air yang tidak akan dijumpai di tempat-tempat rekreasi lain di Indonesia," ucap Budi.

Untuk menjamin kenyamanannya, pembangunan Kolam Apung ini benar-benar disiapkan secara teliti. Serangkaian uji coba telah dilakukan sejak 2006 termasuk dengan meminta rekomendasi dari berbagai dokter ahli seperti spesialis mata, THT, cardiovascular, ginekologi, kulit dan kelamin.

Bahkan untuk perawatannya, menurut rekomendasi ahli, Kolam Apung tidak memerlukan perawatan air dengan bahan kimia, karena tidak ada organisme yang bisa hidup di air ini. Hanya perlu dilakukan filtrasi untuk membersihkan air kolam dari kotoran.



TEMPO/SUBEKTI

minta banding ke pengadilan pajak.

Pilihan meminta Gayus turun tangan untuk kasus ini tepat. Sebagai petugas penelaah keberatan di Direktorat Keberatan dan Banding, sehari-harinya Gayus memang berkutat dengan kasus di pengadilan pajak.

Dalam proses sidang banding di pengadilan pajak, Gayus mengaku tidak perlu banyak turun tangan: dia hanya sesekali datang di ruang sidang. Permainan toh bisa dikendalikan dari luar. Berkas Gayus, banding yang diajukan Bumi dikabulkan pengadilan pajak.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, mencium bau tak sedap dalam upaya banding pajak Bumi ini. Menurut dia, dalam laporan keuangan 2005 jumlah pajak yang dibayar perusahaan itu Rp 548 miliar, lebih rendah daripada 2004 yang Rp 619 miliar.

"Penurunan itu janggal," katanya. Sebab, sepanjang 2005 terjadi kenaikan penjualan yang dipicu melonjaknya harga batu bara di pasar dunia. "Setoran pajak seharusnya naik, bukan malah turun."

"Persembahan" lain Gayus bagi Grup Bakrie terjadi menjelang akhir 2008. Kepada polisi, Gayus mengaku diminta membuat surat pemberitahuan pajak pembetulan PT Arutmin Indonesia dan KPC untuk periode 2005-2006. Untuk kerja ini, dia diberi imbalan US\$ 2 juta.

Dua perusahaan ini membutuhkan tangan dingin Gayus untuk merapikan laporan keuangan agar bisa menikmati *sunset policy*. Program *sunset policy* yang digulirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini memberikan kesempatan wajib pajak membetulkan SPT tahun 2007 dan tahun sebelumnya

agar bisa lolos dari sanksi administratif.

Tangan dingin Gayus kembali manjur. Kerja kerasnya membuahkan hasil: dua perusahaan ini bisa ikut program *sunset policy*, yang berakhir pada 31 Desember 2008. Kepada penyidik polisi, Gayus menyatakan bahwa pekerjaannya menggarap laporan keuangan dua perusahaan Bakrie tidak berhubungan dengan tugas pokoknya di Direktorat Jenderal Pajak.

Dileep Srivastava, juru bicara Bumi Resources, yang juga membawahkan KPC dan Arutmin, membantah semua keterangan Gayus. "Semua tuduhan tentang status pajak dan dugaan pengurangan pajak yang menyalahi aturan itu tak berdasar," katanya.

Dia menegaskan, sebagai perusahaan terbuka, semua laporan keuangan termasuk pajak perseroan selalu diurus dengan transparan dan bisa langsung dinilai oleh publik.

Pelaksana tugas Direktur Intelijen dan Penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak Pontas Pane mengaku tidak bisa berbuat banyak. Kata Pontas, lembaganya tak lagi memiliki wewenang memeriksa wajib pajak badan usaha yang pernah diperiksa dan diputuskan sengketanya di pengadilan pajak. "Administrasinya sudah pindah ke pengadilan pajak," kata Pontas. "Kalau ada suap, kepolisian yang menanganinya."

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi berjanji tidak akan mengabaikan keterangan Gayus itu. "Kami akan memeriksa semua pihak yang disebut Gayus," katanya.

Setri Yasra, Dwidjo U. Maksam, Oktamandjaya Wiguna, Nalia Rifika, Rieka Rahardiana



Lalu Mara Satriawangsa:

Dia Menuduh, Dia Harus Membuktikan

GAYUS Halomoan Tambunan menyeret tiga perusahaan Grup Bakrie. Menurut pegawai golongan IIIa Direktorat Pajak tersangka korupsi dan pencucian uang itu, PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin Indonesia menggelontorkan dana US\$ 7 juta buat membereskan persoalan pajak mereka. Sebagian, yakni US\$ 3 juta, masuk kantong Gayus.

Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, 45 tahun, membantah semua omongan Gayus kepada polisi itu. "Semua tidak benar," katanya kepada wartawan *Tempo*, Oktamandjaya Wiguna, Jumat pekan lalu.

Perusahaan Grup Bakrie tersangkut lagi kasus pajak....

Pak Ical (sapaan Aburizal—*Red*.) secara pribadi tidak pernah ada masalah dengan pajak. Beliau telah lama memiliki nomor pokok wajib pajak. Begitu juga perusahaan beliau yang sudah berkontribusi besar dalam pendapatan negara di bidang perpajakan. Keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan PT Kaltim Prima Coal membuktikan pajak kami tak ada masalah (MA pada 24 Mei lalu menolak permohonan peninjauan kembali Dirjen Pajak dalam sengketa mengenai laporan pajak Kaltim Prima pada 2007 yang dinilai tak beres—*Red*).

Tapi Direktorat Jenderal Pajak menilai laporan Bumi dan unit bisnisnya bermasalah?

Yang memungut pajak tahu aturan dan yang dipungut juga tahu aturan. Perusahaan (milik keluarga Bakrie) sebagai wajib pajak ya membayar apa yang harus dibayar, tapi kalau yang tidak harus dibayar, masak harus dibayar? Pajak itu kan instrumen fiskal, bukan instrumen politik.

Gayus menyatakan pernah membantu membereskan persoalan pajak perusahaan Bakrie, termasuk ikut mengurus banding kasus pajak Bumi?

Bumi itu perusahaan publik, dan saya kira semua perusahaan publik punya konsultan pajak yang teregistrasi.

Ada eksekutif perusahaan Bumi yang meminta bantuan Gayus mengurus pajak?

Semua karyawan perusahaan milik Bakrie menjunjung tinggi prinsip profesionalisme. Perusahaan bisa bertahan lama karena semua karyawannya menjunjung tinggi profesionalis-

"Bumi perusahaan publik yang arus kasnya jelas dan proses audit keuangannya juga jelas."



DOK. PRI

me. Itulah kenapa perusahaan ini akan bertahan 100 tahun lagi. Pak Ical juga sangat percaya pada kompetensi para profesional yang mengelola perusahaannya

Kepada penyidik Gayus bercerita diberi imbalan sekitar US\$ 3 juta?

Saya sudah membaca itu dan semua itu tidak benar. Bumi perusahaan publik yang arus kasnya jelas dan proses audit keuangannya juga jelas.

Gayus juga menyatakan beresnya perkara pajak Bumi karena uang tadi sudah dialirkan ke pengadilan pajak ataupun kantor pajak?

Dia harus membuktikan itu. Dia yang menuduh, maka dialah yang harus membuktikan.

Anda yakin dalam pengurusan pajak Bumi dan unit bisnisnya tak ada penyimpangan?

Soal detail pengurusan pajak harus ditanya ke Bumi, saya tidak bisa

mengomentari hal itu. Yang jelas, perusahaan-perusahaan Bakrie adalah perusahaan publik yang transparan. Laporan keuangan yang disampaikan per kuartal itu juga selalu melewati proses audit oleh auditor independen terdaftar. Selama ini enggak ada masalah, semua *clear*.

Bagaimana keluarga Bakrie melihat permasalahan Gayus ini?

Pak Ical sudah menyampaikan langsung kepada publik bahwa semua tuduhan pajak atas dirinya dan perusahaannya tidak benar. Yang penting sekarang, seperti beliau sampaikan, jalankan saja semuanya dengan baik.

Keluarga Bakrie akan menuntut Gayus?

Capeklah kami kalau begitu. Pakai asas praduga tak bersalah saja. Pokoknya, dia yang menuduh, maka dialah yang harus membuktikan, bukan kami yang direpotkan.